

**LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**



**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Karanganyar terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan PD Dinas Sosial untuk periode satu tahun. Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar merupakan pedoman bagi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Seksi didalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang memuat program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepala seksi. Selanjutnya Renja PD Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024.

KARANGANYAR, JULI 2023

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB. I PENDAHULUAN ...	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.3.1. . Maksud	
1.3.2. Tujuan ...	
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	37
3.4. Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah	49
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	50
BAB. V PENUTUP	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023	11
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra	12
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar	25
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar	27
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024.....	34
Tabel 3.1	Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran (Target Tahun 2024) ..	37
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 4.1	Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan bidang kesejahteraan sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakatnya. Sebagai pencerminan dari tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan sumber bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui usaha-usaha Kesejahteraan Sosial yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Kehidupan sosial pada saat ini dilandaskan pada kurangnya peranan sosial, pengendalian dan pengawasan usaha kesejahteraan sosial, kurangnya jaminan sosial dan kurangnya penggalan sumber kesejahteraan sosial.

Guna mewujudkan sasaran penanganan kehidupan sosial yang dinamis maka program kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar diarahkan kepada pelaksanaan Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial serta Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Karanganyar – Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah I-6 Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 111);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
29. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
30. Peraturan Bupati Karanganyar No 16 Tahun 2023 tentang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

31. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu satu tahun (tahun 2024), yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dan rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2024 adalah :

1. Untuk menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2024.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintah dan pembangunan
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Sebagai acuan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

mengemukakan secara ringkas pengertian Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, fungsi Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten

Karanganyar, keterkaitan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan dokumen RKPD dan dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.2 Landasan Hukum

memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.3 Maksud dan Tujuan

berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

1.4 Sistematika Penulisan

menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH BARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Menguraikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan

isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

3.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang yang ada di Dinas Sosial dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

berisi tentang uraian pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, disertai dengan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun 2022 dan perkiraan capaian Renja tahun 2023 serta pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang meliputi :

1. Kebijakan perencanaan program dan kegiatan
2. Pelaksanaan rencana program dan kegiatan
3. Capaian kinerja program dan kegiatan

Pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar melaksanakan 6 Program dengan 12 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5 kegiatan, 14 sub kegiatan)
2. Program Pemberdayaan Sosial (2 kegiatan, 2 sub kegiatan)
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 kegiatan, 3 sub kegiatan)
4. Program Penanganan Bencana (1 kegiatan, 1 sub kegiatan)
5. Program Rehabilitasi Sosial (2 kegiatan, 4 sub kegiatan)
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 kegiatan, 2 sub kegiatan)

Indikator kinerja tahun 2022 yang ada pada Renstra Dinas Sosial yaitu Presentase Cakupan Pelayanan SPM dari target 100% realisasi sebesar 100%.

Evaluasi capaian hasil indikator kinerja tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada table 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Renstra Tahun 2018-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Sasaran Kinerja Tahun 2022			Target Kinerja Tahun 2023	Target Capaian Renstra 2018-2023
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Nilai SAKIP	Nilai	74,44	69,65	93,56	79,44	79,44
Meningkatnya Pelayanan SPM	Prosentase Cakupan Pelayanan SPM	%	100	100	100	100	100

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tahun lalu (2021) dan tahun berjalan (2022), maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 pada halaman berikut.

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kabupaten Karanganyar**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	69,42%	69,42%
1 06 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	59,51%	59,51%
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Volume pelayanan pengiriman surat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	6,98%	6,98%
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah sarana komunikasi yang dikelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	56,25%	56,25%
1 06 01 2.08 02 1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa	Jumlah sarana sumber daya air yang dikelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	56,25%	56,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sarana listrik yang dikelola	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	56,25%	56,25%				
			Volume penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor.	28 unit/tahun	28 unit/tahun	28 unit/tahun	28 unit/tahun	100%	28 unit/tahun	36,86%	36,86%				
1	06	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor yang terbeli	35 jenis	35 jenis	35 jenis	35 jenis	100%	35 jenis	69,69%	69,69%
1	06	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor yang terbayarkan honorariumnya.	8 orang/tahun	10 orang/tahun	10 orang/tahun	10 orang/tahun	100%	8 orang/tahun	69,69%	69,69%
1	06	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,99%	66,99%
1	06	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor	44 macam	44 macam	44 macam	44 macam	100%	44 macam	63,76%	63,76%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	94,40%	94,40%
1 1 06 01 2.06 05 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah barang penggandaan yang tersedia	8000 lembar	8000 lembar	8000 lembar	8000 lembar	100%	8000 lembar	94,40%	94,40%
		Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	9 macam	9 macam	9 macam	9 macam	100%	9 macam	56,25%	56,25%
1 06 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah konsumsi rapat dinas/penataran/penyuluhan/kursus dan kegiatan sejenis lainnya yang disediakan	750 orang	724 orang	724 orang	724 orang	100%	750 orang	74,53%	74,53%
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar negeri.	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100%	12 bln	64,87%	64,87%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	29,08%	29,08%
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terbeli	3 laptop	3 laptop	3 laptop	3 laptop	100%	3 laptop	29,08%	29,08%
1 06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	55,57%	55,57%
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Volume bahan/material pengecatan yang tersedia	6 macam	6 macam	6 macam	6 macam	100%	6 macam	54,57%	54,57%
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga tukang pengecatan yang terbayar	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	100%	5 orang	54,57%	54,57%
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Volume kendaraan dinas yang terpelihara	73 unit	73 unit	73 unit	73 unit	100%	73 unit	55,42%	55,42%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	78,89%	78,89%
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	78,89%	78,89%
1 06 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75%	75%
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Volume penyediaan ATK untuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan	11 macam	11 macam	11 macam	11 macam	100%	11 macam	57,09%	57,09%
1 06 01 2.01 06 1 06 01 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen	Jumlah tenaga administrasi kegiatan pengelolaan keuangan, barang dan perencanaan yang terbayar	4 orang / 12 bulan	4 orang / 12 bulan	4 orang / 12 bulan	4 orang / 12 bulan	100%	4 orang / 12 bulan	57,09%	57,09%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen review Renstra yang tersedia	1 dokumen	4 orang / 12 bulan	4 orang / 12 bulan	4 orang / 12 bulan	100%	1 dokumen	96,73%	96,73%			
1	06	02	Program Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%			
1	06	02	2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan PMKS	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%		
1	06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%		
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa kesetiakawanan	4 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	4 kegiatan	90%	90%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah penanganan timbulnya penyandang penyakit sosial	10 orang	10 orang	10 orang	10 orang	100%	10 orang	64,57%	64,57%
			Jumlah anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	9 anak	5 anak	9 anak	5 anak	55,55%	9 anak	37,77%	37,77%
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	70 orang	50 orang	70 orang	50 orang	71,42%	70 orang	37,77%	37,77%
1	06	04	2.01	06							
1	06	04	2.02								
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan	17 PA/Lemba ga/Yayasa n/Organisasi	17 PA/Lemba ga/Yayasa n/Organisasi	17 PA/Lemba ga/Yayasa n/Organisasi	17 PA/Lemba ga/Yayasa n/Organisasi	100%	17 PA/Lemba ga/Yayasa n/Organisasi	37,77%	37,77%
			Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum	12 anak	4 anak	12 anak	4 anak	33,33%	12 anak	37,77%	37,77%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya pendampingan bansos kepada anak yatim, piatu, yatim piatu, dan lansia	5640 orang	8125 orang	5640 orang	8125 orang	144,06%	5640 orang	37,77%	37,77%
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	20 orang	15 orang	20 orang	15 orang	75%	20 orang	37,77%	37,77%
		Jumlah bimbingan sosial bagi penyandang disabilitas	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100%	100 orang	37,77%	37,77%
		Jumlah PMKS yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	34,25%	34,25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	7 kegiatan	34,25%	34,25%
1 06 05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin, KAT, dan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,98%	75,98%
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	75,98%	75,98%
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Petugas PMK	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	100%	177 PMK 3 petugas kabupaten (180 orang)	53,86%	53,86%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 1 06 05 2.02 02 03	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Termotivasinya penerima RTLH dalam membangun rumahnya untuk kehidupan yang layak	100 orang	50 orang	100 orang	50 orang	50%	100 orang	53,86%	53,86%
		Berkurangnya Beban Pengeluaran KPM dalam hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga	26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)	26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)	26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)	26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)	100%	26 Timkor 40 pendamping dan suplier (66 orang)	53,86%	53,86%
		Fasilitasi Pelayanan dan Penanganan Masyarakat Rawan Sosial	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	81,73%	81,73%
1 1 06 05 2.02 03 04	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terbantunya kebutuhan pangan untuk fakir miskin	2100 paket	5700 paket	2100 paket	5700 paket	271,4%	2100 paket	81,73%	81,73%
		Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	81,73%	81,73%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Pemberian bantuan/Fasilitas masyarakat kehabisan bekal	100 jiwa	40 jiwa	100 jiwa	40 jiwa	40%	100 jiwa	81,73%	81,73%				
		Terbinanya Anggota KUBE	240 orang	75 orang	240 orang	75 orang	31,25%	240 orang	10,95%	10,95%				
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Cakupan Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100%	78,33%	78,33%		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	100%	100%	100%	78,33%	78,33%		
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial	131 KK	150 KK	131 KK	131 KK	100%	131 KK	78,33%	78,33%
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	-	100%	100%	100%	100%	59,30%	59,30%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Karanganyar

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (tnn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial sebagai koordinator bidang Pelayanan Sosial telah mampu mengkoordinasikan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD.

Beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar khususnya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar masih belum memiliki panti rehabilitasi atau penampungan sendiri yang digunakan untuk melayani para PMKS, sehingga sangat bergantung pada daya tampung dari panti sosial dan rehabilitasi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan pihak swasta. Hal ini menyebabkan ketidak optimalan penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar, karena daya tampung panti-panti tersebut pun sangat terbatas.
2. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai dengan saat ini Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar masih belum memiliki Pejabat Fungsional Pekerja Sosial.
3. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Karanganyar.
4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target kinerja dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 seperti pada table 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Karanganyar

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
Urusan Pemerintah Bidang Sosial				12.737.931.000	Urusan Pemerintah Bidang Sosial				14.224.701.916	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	5.569.431.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	5.146.632.516	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	100%	137.500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	100%	190.080.600	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	16.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DINSOS	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	9.650.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	121.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DINSOS	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	180.430.600	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.131.531.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.922.619.216	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	4.131.531.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DINSOS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	2.922.619.216	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	57.750.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DINSOS	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	10.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DINSOS	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 paket	57.750.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	486.300.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	737.811.800	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DINSOS	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	27.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	66.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	66.022.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINSOS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	25.300.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DINSOS	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	12.147.800	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	DINSOS	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	55.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DINSOS	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	75.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	330.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DINSOS	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	553.842.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DINSOS	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	DINSOS	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	5 dokumen	3.800.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	33.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100%	239.592.500	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINSOS	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	33.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DINSOS	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 unit	239.592.500	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	429.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	599.145.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	22.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	22.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	132.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	168.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	77.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	75.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	198.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DINSOS	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	334.145.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	100%	342.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	100%	399.633.400	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINSOS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 unit	177.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DINSOS	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 unit	249.993.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	165.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DINSOS	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	149.640.400	
Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	93.500.000	Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	590.371.700	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	100%	93.500.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	100%	590.371.700	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Karanganyar	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3 sertifikat	93.500.000	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Karanganyar	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3 sertifikat	590.371.700	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Rehabilitasi Sosial		Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial	100%	1.420.000.000	Program Rehabilitasi Sosial		Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial	100%	1.187.287.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	100%	1.170.000.000	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	100%	943.995.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120 orang	220.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	120 orang	152.200.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	200 orang	950.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	200 orang	791.795.000	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	100%	250.000.000	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	100%	243.292.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	200 orang	250.000.000	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kab. Karanganyar	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	200 orang	243.292.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	5.420.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	7.072.712.700	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	100%	5.420.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	100%	7.072.712.700	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	500 keluarga	1.184.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	500 keluarga	1.414.912.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	2100 keluarga	4.200.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kab. Karanganyar	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	2100 keluarga	5.638.800.700	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	50 orang	36.000.000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kab. Karanganyar	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	50 orang	19.000.000	
Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	200.000.000	Program Penanganan Bencana		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	182.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	200.000.000	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	100%	182.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Induktif	Program/kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Karanganyar	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	150 orang	200.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kab. Karanganyar	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	150 orang	182.000.000	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	35.000.000	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	100%	45.698.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	35.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100%	45.698.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	35.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kab. Karanganyar	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	1 makam	45.698.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Penelitian yang dimaksud adanya peran pemerintah untuk meningkatkan laju perekonomian masyarakat melalui program pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Program ini difungsikan untuk membantu akses pergerakan perekonomian masyarakat desa.

Dalam mengakomodir berbagai usulan dari masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan sosial tentunya Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan tugas dan fungsi serta kemampuan secara anggaran dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, hal ini menyebabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar mungkin tidak dapat mengakomodir seluruh usulan rencana pembangunan kesejahteraan sosial dari masyarakat untuk Tahun 2023.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Karanganyar

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Besaran/	Catatan
			Kinerja	Volume	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

- a. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
- b. Ketelantaran, yaitu pengabaian / penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh

ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggung jawab;

- c. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
- d. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar;
- e. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral, dan etika yang berlaku di masyarakat;
- f. Korban bencana, yaitu perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi sebagai akibat dari terjadinya bencana yang menyebabkan mereka mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
- g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang (baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi:

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan bidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bertanggungjawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar ialah :

Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran – Indikator Sasaran (Target Tahun 2024)

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Tata Pemerintah yang Berkualitas Dengan Semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran	Nilai SAKIP	Nilai	81
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial	Angka Kemiskinan	Meningkatkan Perlindungan Sosial	Persentase Penanganan PPKS	%	70

3.3 Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024 sebagai tahun pertama periode RPD 2024-2026, sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai daya dukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (7 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan)
2. Program Pemberdayaan Sosial (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
3. Program Rehabilitasi Sosial (2 kegiatan , 4 Sub Kegiatan)
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan)
5. Program Penanganan Bencana (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan)

Program dan kegiatan diatas direncanakan dan dilaksanakan guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran bidang sosial sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Karanganyar. Program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada table 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Karanganyar

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
1	06				Urusan Pemerintah Bidang Sosial				8.213.776.062				8.792.500.000
1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		100%	3.883.952.862			100%	4.677.500.000
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan		100%	35.388.100			100%	47.000.000
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	DINSOS	6 dokumen	9.087.900	APBD		6 dokumen	10.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DINSOS	2 laporan	26.300.200	APBD		2 laporan	27.000.000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah	DINSOS	0 laporan	0	APBD		4 laporan	10.000.000
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.733.223.362			100%	3.180.000.000
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DINSOS	14 bulan	2.733.223.362	APBD		14 bulan	3.180.000.000
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	970.200			100%	30.000.000
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	DINSOS	2 paket	970.200	APBD		2 paket	30.000.000
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	283.913.420			100%	507.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DINSOS	1 paket	10.531.550	APBD		1 paket	10.000.000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DINSOS	1 paket	25.125.870	APBD		1 paket	40.000.000
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	DINSOS	1 paket	7.369.500	APBD		1 paket	20.000.000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DINSOS	1 paket	2.350.000	APBD		1 paket	30.000.000
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DINSOS	12 laporan	35.000.000	APBD		12 laporan	50.000.000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DINSOS	12 laporan	200.160.000	APBD		12 laporan	350.000.000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	DINSOS	5 dokumen	3.376.500	APBD		5 dokumen	7.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor		100%	10.000.000			100%	68.500.000
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	DINSOS	2 unit	10.000.000	APBD		3 unit	30.000.000
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	DINSOS	0 unit	0	APBD		3 unit	38.500.000
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	514.844.280			100%	545.000.000
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	DINSOS	12 laporan	863.300	APBD		12 laporan	20.000.000
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	DINSOS	12 laporan	136.800.000	APBD		12 laporan	150.000.000
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DINSOS	12 laporan	22.660.000	APBD		12 laporan	25.000.000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang	DINSOS	12 laporan	354.520.980	APBD		12 laporan	350.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		disediakan							
1	06 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	305.613.500			100%	300.000.000
1	06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	DINSOS	73 unit	196.500.000	APBD	73 unit	200.000.000
1	06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	DINSOS	1 unit	109.113.500	APBD	1 unit	100.000.000
1	06 02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		100%	209.153.512		100%	200.000.000
1	06 02 2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial		100%	209.153.512		100%	200.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Kab. Karanganyar	3 sertifikat	209.153.512	APBD		-	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		199 orang	200.000.000
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial		100%	1.266.668.050			100%	900.000.000
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT		100%	1.106.401.550			100%	180.000.000
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		200 orang	40.000.000
1	06	04	2.02	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		200 orang	40.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	04	2.03	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		200 orang	100.000.000
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Kab. Karanganyar	120 orang	203.916.200	APBD		-	0
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Kab. Karanganyar	200 orang	902.485.350	APBD		-	0
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis		100%	160.266.500			100%	720.000.000
1	06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan	Kab. Karanganyar	50 orang	58.275.000	APBD		50 orang	120.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	06	04	2.02	08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA	Kab. Karanganyar	200 orang	101.991.500	APBD		500 orang	150.000.000
1	06	04	2.02	09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan atau identitas anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		20 orang	20.000.000
1	06	04	2.02	10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesejatan dasar	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		200 orang	100.000.000
1	06	04	2.02	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		200 orang	100.000.000
1	06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan	Kab. Karanganyar	0 orang	0	APBD		120 orang	230.000.000
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		100%	2.665.480.938			100%	2.800.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran		100%	2.665.480.938			100%	2.800.000.000
1	06	05	2.02	01	Pendataan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota yang didata	Kab. Karanganyar			APBD		400000 orang	1.260.000.000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	Kab. Karanganyar	500 keluarga	1.291.000.000	APBD		-	0
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga	Kab. Karanganyar	2100 keluarga	1.338.480.938	APBD		1 keluarga	1.500.000.000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Kab. Karanganyar	50 orang	36.000.000	APBD		50 orang	40.000.000
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota		100%	150.559.000			100%	175.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun (2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun (2025)	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial		100%	150.559.000			100%	175.000.000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan	Kab. Karanganyar	150 orang	150.559.000	APBD		150 orang	175.000.000
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik		100%	37.961.700			100%	40.000.000
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		100%	37.961.700			100%	40.000.000
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota	Kab. Karanganyar	1 makam	37.961.700	APBD		1 makam	40.000.000

3.4 Tantangan dan Peluang Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, meliputi:

1. Keterbatasan sumber daya manusia sehingga masih kosongnya beberapa jabatan pelaksana yang ada di dalam struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
2. Munculnya dinamika sosial di masyarakat menambah beragam permasalahan sosial di lingkungan masyarakat, sehingga menjadi prioritas tersendiri bagi bidang sosial khususnya dalam mengatasinya;
3. Kondisi ekonomi, politik yang belum stabil;
4. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat.

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar meliputi:

1. Peningkatan profesionalisme aparatur serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparansi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik;
2. Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang-Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.
3. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang lebih integratif.
4. Dukungan infrastruktur PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat.
5. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial sebagai instrumen untuk mendorong pengembangan dan optimalisasi pelayanan rehabilitasi sosial di luar Panti Sosial.
6. Kerjasama stakeholders baik perguruan tinggi, Dunia Usaha maupun lembaga pelayanan sosial dasar lainnya dalam kerangka melakukan terobosan dan inovasi dalam penanganan PMKS yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
7. Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar selama 3 tahun dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2024 – 2026, secara tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan, dimana Rencana Kerja Tahunan ini mengacu pada Rencana Strategis yang sudah ditetapkan.

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2024 untuk pendanaannya seperti pada table 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pencapaian tujuan sesuai Renstra dan Renja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2024

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar					
				Urusan Pemerintah Bidang Sosial					8.213.776.062
Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks reformasi birokrasi								
		Meningkatkan kualitas tata laksana pemerintah	Nilai SAKIP				%	81	3.883.952.862
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	Jumlah indikator sasaran dan program di OPD yang tercapai dibagi jumlah indikator sasaran dan program di OPD, kali 100%	%	100	3.883.952.862
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perencanaan dan Keuangan	Persentase Dokumen yang Disusun Selama 1 Tahun	%	100	35.388.100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		dokumen	6	9.087.900
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		laporan	2	26.300.200

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah evaluasi kinerja perangkat daerah		laporan	0	0
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	2.733.223.362
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		orang/bulan	14	2.733.223.362
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	970.200
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		paket	2	970.200
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	283.913.420
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		paket	1	10.531.550
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		paket	1	25.125.870
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		paket	1	7.369.500
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		paket	1	2.350.000
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		laporan	12	35.000.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		laporan	12	200.160.000

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		dokumen	5	3.376.500
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Tersedia	%	100	10.000.000
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		unit	2	10.000.000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan		unit	0	0
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	514.844.280
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		laporan	12	863.300
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		laporan	12	136.800.000
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		laporan	12	22.660.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan	12	354.520.980
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%	100	305.613.500

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		unit	73	196.500.000
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		unit	1	109.113.500
Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan								
		Meningkatkan perlindungan sosial	Persentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)				%	70	4.329.823.200
				Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang diberdayakan dibagi jumlah PSKS dibagi 100	%	100	209.153.512
								100	209.153.512
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Lembaga Kesejahteraan Sosial	%	3	209.153.512
				Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		sertifikat	100	1.266.668.050
				Program Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi Sosial	Persentase Terlaksananya Kegiatan Prehabilitasi Sosial	%	100	1.106.401.550

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	Persentase Tertanganinya Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Yatim, Piatu, Yatim piatu, Lansia, dan PGOT	%	120	203.916.200
				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial		orang	200	902.485.350
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat		orang	100	160.266.500
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	Persentase Tertanganinya Penyandang Disabilitas dan Eks Penyandang Penyakit Kronis	%	50	58.275.000
				Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan		orang	200	101.991.500
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan SAPZA		orang	100	2.665.480.938
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase KK miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah KK miskin yang terbantu dibagi jumlah target pelayanan KK miskin dikali 100	%	100	2.665.480.938
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersalurkannya Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	Persentase Penyaluran Bantuan untuk KPM yang tepat sasaran	%	0	0

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota		keluarga	500	1.291.000.000
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga		keluarga	2100	1.338.480.938
				Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat		orang	50	36.000.000
				Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah KK korban bencana alam dan sosial yang terbantu dibagi Jumlah target SPM korban bencana alam dan sosial dikali 100	%	100	150.559.000
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	%	100	150.559.000
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan		orang	150	150.559.000
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana TMP dibagi target pemenuhan sarana dan prasarana TMP dikali 100	%	100	37.961.700
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	%	100	37.961.700

TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	FORMULASI	SATUAN	2024	
								Target	Rp
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah makam yang terpenuhi pemeliharannya pada taman makam pahlawan kabupaten/kota		makam	1	37.961.700

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
2. Kepala BAPERLITBANG	
3. Sekretaris BAPERLITBANG	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPERLITBANG	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

4. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
5. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
6. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Kesejahteraan Sosial Masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

7. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
8. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
9. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

